

**KONSEP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN RUANG DAN  
WILAYAH DI KABUPATEN BULUKUMBA (TELAAH ATAS  
KETATANEGARAAN ISLAM)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**MUH. YUSRIL ABNI**  
NIM: 10300113234

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Yusril Abni  
Nim : 10300113234  
Tempat/Tgl Lahir : Balangriri/22 Juli 1995  
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Alamat : Bulukumba  
Judul : Konsep Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba (telaah atas Ketatanegaraan Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, uraian, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 17 November 2017  
Penyusun,

Muh. Yusril Abni  
NIM: 10300113234

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Konsep Pemerintah Daerah dalam Penetaan Ruang dan Wilayah di Kab. Bulukumba (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)”, yang disusun oleh **Muh. Yusril Abni**, NIM: 10300113234, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 M, bertepatan dengan 04 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 22 November 2017 M

04 Rabiul Awal 1439 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Penguji I	: Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.H.I	(.....)
Penguji II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. Darussalam, M. Ag**

NIP. 19621016199003 1 003

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain segala puji syukur kita kehadirat Allah swt. Tuhan yang maha mengetahui, pemilik segala ilmu, karena atas petunjuk-Nya beserta nikmat-Nya sehinggah skripsi yang berjudul: **KONSEP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN RUANG DAN WILAYAH DI KABUPATEN BULUKUMBA (TELAAH ATAS KETATANEGARAAN ISLAM)** dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.

Merangkai kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran, dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Ambo Rappe, ibunda Sumarti tercinta yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung penulis dan tidak henti-hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.



2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Aladdin Makassar.
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Dan Ketataengaraan dan Dr. Kurnati, S.Ag., M. Hi selaku Sekertaris Jurusan.
4. Prof. Dr. Usman, MA dan Rahmiati, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan masukan dan arahan mengenai penulisan skripsi ini.
5. Abdul Rahman S.Hi terima kasih telah membimbing dan memberikan dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Muh. Zulhajar syam, S.H atas kerja samanya menemani selama proses pekerjaan skripsi.
7. Terima kasih Kepada Muhammad Askar, S.H atas waktu dan bantuannya selama menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk seluruh pejabat terkait Baik instansi Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bulukumba, DPRD Kab. Bulukumba, dan inspektorat Kab. Bulukumba yang telah menerima dan membantu penulis selama proses penelitian.
9. Terima kasih kepada saudara seperjuangan Albar, ilo, fadel maroni, wander, Eky, Asran, Ayu setiawati, Akram, Imam, Sri Risky Ayu, Yari, Alvin, Ifa, Nisa, Ana, dan wahyu maaf tidak bisa tulis semuanya.
10. Terima kasih kepada Iftytah Amelyani Umar yang selalu memberikan penyemangat serta bantuan do'a selama ini.

11. Teman-teman kelas Hukum Pidana dan Ketatanegaraan E yang telah mengajarkan penulis memahami hakikat menjadi mahasiswa selama menjalani bangku perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang sedikit berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu. Tidak disebutkan bukan berarti mengurangi esensi kalian.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahaan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh halayak umum. Semoga Allah swt, selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah swt, akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal badah yang berkelanjutan disisi-Nya. Amin.

Makassar , 22 November 2017

Muh. Yusril Abni  
NIM: 10300113234

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan ruang lingkup Tata Ruang .....	12
B. Konsep dasar hukum Tata Ruang .....	15
C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	18
D. Rencana Penataan Ruang.....	24
E. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penataan Ruang ... .....	27
F. Pengawasan Tata Ruang dan Pengawasan Wilayah .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba.....	41
C. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Bulukumba dalam mengawasi penataan ruang dan wilayah .....	47

D. Manfaat Penataan Ruang dan Wilayah dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Bulukumba .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Implikasi Penelitian .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
Y	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	I	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

#### 4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa'marbuutah* ada dua, yaitu *taa'marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).



Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

## **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## **8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fizilaal Al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### **9. Lafz al- Jalaalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

contoh :

*hum fi rahmatillaah*

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

contoh:

*Wa ma muhammadun illaa rasul*

*Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan*

*Syahrul ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'a*

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)
---

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## **ABSTRAK**

**NAMA : MUH. YUSRIL ABNI**  
**NIM : 10300113234**  
**JUDUL : KONSEP PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG DAN WILAYAH DI KABUPATEN BULUKUMBA (TELAAH ATAS KETATANEGARAAN ISLAM)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep pemerintah daerah dalam Penataan Ruang dan Wilayah di kabupaten bulukumba (telaah atas ketatanegaraan Islam)?. Pokok masalah ini akan di analisa ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah fungsi pemerintah daerah Bulukumba dalam Penataan Ruang dan Wilayah di kabupaten bulukumba?, 2) Kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah Bulukumba dalam mengawasi penataan ruang dan wilayah?, 3) Bagaimanakah manfaat Penataan Ruang dan Wilayah dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Bulukumba?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: syar'i dan yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kab. Bulukumba, Anggota DPRD Bulukumba, Inspektorat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, klarifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diolah dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba yaitu: di DPRD mempunyai 3 tugas yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan, untuk Dinas Penataan Ruang melakukan pengawasan dengan membentuk tim pengawas pembangunan dan untuk Inspektorat melakukan pengawasan mengenai ke uangan, aspek fisik pekerjaan insfrastruktur dan sumber dayanya, 2) Kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah Bulukumba dalam mengawasi Penataan Ruang dan Wilayah yaitu: kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pengawasan Tata Ruang dan Wilayah serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bulukumba, 3) Manfaat Penataan Ruang dan Wilayah dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Bulukumba yaitu: manusia diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam adalah merupakan upaya untuk mensyukuri limpahan nikmat dan karunia Allah Swt.

Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Pemerintah Bulukumba harusnya lebih mempertegas lagi pengawasan dalam hal Penataan Ruang untuk meminimalisir terjadinya banjir dan kemacetan sehingga Penataan Ruang Bulukumba bisa tercapai sebagaimana semestinya, 2) Pemerintah Kabupaten Bulukumba harusnya membangun sarana dan prasarana serta masyarakat harusnya ikut serta membantu pemerintah dalam hal mengawasi jalanya Penataan Ruang, 3) Masyarakat sadar agar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana yang di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Negara diuntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup>

Salah satu kebutuhan masyarakat yang penting untuk dipenuhi adalah penataan ruang.<sup>2</sup> dan wilayah yang aman, nyaman, produktif, adil, dan berkelanjutan. Untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang yang berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut, maka dibutuhkan suatu arahan yang bersifat nasional (bahkan internasional) berupa politik penataan ruang; dan untuk dapat di terapkan secara memaksa harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Di Indonesia secara konstitusional telah mengatur secara umum terkait aspek pemenuhan dan pemanfaatan ruang<sup>4</sup> dan wilayah, yakni dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

---

<sup>1</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016), h. 18.

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat 1 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>3</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016), h. 8.

<sup>4</sup>Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain itu, dalam tatanan hukum nasional juga telah diatur sejumlah regulasi terkait penataan ruang dan wilayah, yakni hadirnya; Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang diikuti dengan berbagai aturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, maupun peraturan lainnya yang terkait. Pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang ini, salah satu ketentuan yang baru adalah adanya ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada masyarakat maupun pejabat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dalam menata ruang di Indonesia yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemanfaatan bagi kemaslahatan rakyat Indonesia.

Dalam Islam melarang seseorang melakukan perbuatan yang mendatangkan kerusakan, hal ini sesuai dengan (QS. AL- A'raf 56), dalam konteks ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah di perbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka, Allah SWT melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya serta berendah diri dan memohon belas kasihan-Nya.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pembangunan yang begitu masif, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah

---

<sup>5</sup>Tafsir surat Al-A'raf ayat 55-56, dari <http://www.ibnukatsironline.com>, (20 Januari 2017).

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi dan didalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman rencana tata ruang yang bersifat umum dari suatu wilayah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian atau pengawasan pemanfaatan ruang wilayah.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, RTRW merupakan aturan pokok yang utama dalam pembangunan suatu daerah. Dimana Rencana Tata Ruang Wilayah berperan penting dalam menentukan letak-letak dan pengaturan tata wilayah dalam suatu daerah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi memberikan gambaran bahwa masih kurang pahamnya pemerintah daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. RTRW dalam pengaplikasiannya oleh Pemerintah Daerah lebih cenderung pada pembangunan skala besar, tetapi sering mengabaikan pembangunan skala kecil. Pembangunan skala besar memang sangat penting adanya, akan tetapi pembangunan skala kecil sebenarnya yang paling berpengaruh disuatu wilayah. Karena mayoritas penduduk lebih kepada pembangunan skala kecil, dimana pertumbuhannya tidak teratur dan masih banyak yang tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hal ini akan menyebabkan pembangunan di suatu daerah tidak terkontrol dan ketidakteraturan penataan wilayahnya. Kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap pembangunan skala kecil sekarang telah menjadi fenomena dikalangan

---

<sup>6</sup>*Peran Penting Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mengendalikan Pembangunan*, dari <http://www.nuansagiskonsultan.com>, (18 Januari 2017).



masyarakat, dimana karena kurang pahamnya masyarakat tentang RTRW menyebabkan pembangunan suatu wilayah tidak teratur.<sup>7</sup>

Semakin seringnya frekuensi terjadinya bencana di Indonesia dan menurunnya daya dukung lingkungan merupakan hasil dari perubahan ekosistem akibat dari penyimpangan tata ruang, kondisi ini terjadi karena pembangunan yang tidak di dasarkan pada rencana tata ruang wilayah tetapi berdasarkan kepentingan pemilik modal tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Kota - kota besar dengan kerawanan tinggi diantaranya Jakarta, Medan, Semarang, Makassar, Bandung, dan Solo. Frekuensi bencana di kota besar terus meningkat dikarenakan kapasitas daya dukung kota tidak sebandingdengan jumlah penduduk sehingga mengubah ekosistem.

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang<sup>8</sup> dan pengawasan penataan ruang,<sup>9</sup> serta pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran tata ruang dan wilayah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Bentuk pengawasan pemanfaatan ruang dan wilayah yang bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memberi masukan terkait arahan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pengawasan juga diperlukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian bisa sebagai alat pengontrol pemanfaatan ruang agar sinkron antar sektor dan wilayah. Selain itu, juga agar bisa mewujudkan pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang nasional yang telah ditentukan.

---

<sup>7</sup>*Peran Penting Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mengendalikan Pembangunan*, dari <http://www.nuansagiskonsultan.com>, (18 Januari 2017)..

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kasus terkait lemahnya pengawasan terkait pemanfaatan tata ruang dan wilayah juga banyak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus di Kabupaten Bulukumba, salah satu kasus yang menjadi sorotan masyarakat yaitu banjir yang terjadi di jalan konsolidasi kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, salah satu warga arman jalan tersebut bukan kali ini saja di landa banjir namun setiap kali hujan deras jalan tersebut di genangi air. Warga berharap kepada Dinas Tata Ruang Bulukumba untuk segera membenahi saluran jalan tersebut agar tidak merugikan warga.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu: **“Konsep Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Dan Wilayah Di Kabupaten Bulukumba (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam).**

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami permasalahan, maka akan dijelaskan beberapa variabel yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian
  - a. Konsep pengawasan
  - b. Pemerintah Daerah
  - c. Penataan Ruang
  - d. Wilayah
  - e. Ketatanegaraan Islam

---

<sup>10</sup>Dilanda banjir, jalan konsolidasi bulukumba layaknya sunga dari <http://Makassar.tribunnews.com>, (4 juni 2017}

## 2. Deskripsi Fokus

- a. Konsep Pengawasan yang di maksud dalam judul penelitian ini yakni pengawasan penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- e. Ketatanegaraan Islam adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

Menurut penyusun dalam hal ini telaah atas ketatanegaraan islam di peruntuhkan kepada para pemimpin yang ada di indonesia agar tercipta suatu kedamaian hidup dan tata kehidupan yang harmonis antara satu dengan yang lain guna mencapai kemaslahatan ummat.

Fokus Penelitian	Deskripsi fokus
Konsep Pengawasan	<p>Fungsi Pengawasan yang di maksud dalam judul penelitian ini yakni pengawasan penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pemerintahan Daerah	<p>Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
	<p>Penataan Ruang adalah suatu sistem proses rencana tata ruang,</p>

Penataan Ruang	pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Wilayah	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Ketatanegaraan Islam	Ketatanegaraan Islam adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang di kemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah ini terbagi atas dua yaitu, pokok masalahnya” Bagaimana Konsep Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Dan wilayah Di Kabupaten Bulukumba (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam). Dan sub-sub masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba.?
2. Kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah Bulukumba dalam mengawasi Penataan Ruang dan Wilayah.?
3. Bagaimanakah Manfaat Penataan Ruang dan Wilayah dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Bulukumba.?

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dari penjabaran yang dikemukakan diatas mengenai Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Penataan Ruang dan Wilayah, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa buku yang berkaitan yang itu, diantaranya:

Seperti yang di tulis Yunus Wahid, dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Ruang, penerbit Prenadamedia Group, 2014. Buku ini membahas secara lengkap mengenai hukum tata ruang di Indonesia, adapun yang di maksud Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, dalam bukunya Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, penerbit Nuansa, 2016. Buku ini membahas dengan sangat sistematis dan komprehensif mengenai aspek hukum tata ruang di Indonesia dan kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah, adapun pendapat Koeswadji H. Hermien, dalam bukunya Pengantar Lingkungan Hidup, buku ini menjelaskan tentang lingkungan hidup dan aspek-aspek terkait, menurut Otto Soemarwoto, dalam bukunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Buku ini menjelaskan secara terperinci mengenai konsep analisis dampak lingkungan dan menurut Soejono Soekanto, dalam bukunya Metode Penelitian Hukum, penerbit UII Pres, 1984. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci terkait jenis-jenis metodologi penelitian di bidang

hukum. Buku ini pulalah yang menjadi acuan dan pedoman penulis dalam menyusun penelitian hukum ini.

Dengan melihat beberapa buku yang dikemukakan diatas tidak satupun membahas tentang Konsep Pemerintahan Daerah Dalam Penataan Ruang Dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Ketatanegaraan Islam). Namun ada satu dua buku yang menjelaskan tentang Konsep Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Dan wilayah di Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Ketatanegaraan Islam) tetapi belum signifikan didalam mengemukakan tentang hal tersebut karena itu diperlukan penelitian lanjutan.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang di harapkan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah daerah kabupaten Bulukumba terhadap Penataan Ruang dan Wilayah (Telaah atas Ketatanegaraan Islam).
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kab. Bulukumba dalam mengawasi tata ruang dan wilayah di daerahnya.
- c. Untuk mengetahui pandangan ketatanegaraan Islam terkait fungsi pengawasan pemerintah daerah kab. Bulukumba terhadap Penataan Ruang dan Wilayah.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hukum Tata Ruang dan Wilayah dan

pelaksanaan konsep pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terhadap penataan ruang dan wilayah (Telaah atas Ketatanegaraan Islam).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan konsep pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap Penataan Ruang dan Wilayah (Telaah atas Ketatanegaraan Islam).



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang***

Luasnya cakupan perencanaan Tata Ruang mengarahkan penulis untuk mengungkapkan pengertian dan konsep dasar yang terkandung di dalamnya. Pengertian-pengertian yang tercakup kedalam konsep hukum tata ruang sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang namun demikian untuk dapat menambah khasanah, penulis akan mengemukakan juga pengertian dan konsep dasar dari tata ruang, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut beberapa ahli.<sup>1</sup>

##### **1. Ruang**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah

“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”<sup>2</sup>

Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman

---

<sup>1</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Cet.III-Bandung: Penerbit Nuansa, 2016). h. 23.

<sup>2</sup>Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* Pasal 1 ayat 1.

<sup>3</sup>D.A Tisnamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997, h. 6.

Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai salah satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>4</sup>

## 2. Tata ruang

Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.<sup>5</sup>

Adapun yg dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung, dan lain- lain.

Selanjutnya masih dalam peraturan tersebut, yaitu pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>6</sup>

## 3. Penataan ruang

Dalam UUPR, pasal 1 butir 5 di kemukakan: “penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

---

<sup>4</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 23.

<sup>5</sup>Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* Pasal 1 ayat 2.

<sup>6</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 24.

pemanfaatan ruang.” Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, diharapkan TR/PR dapat berperan untuk: (a) mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) secara berkelanjutan; (b) mencegah atau menghindari pemborosan penataan ruang; dan (c) mencegah terjadinya penurunan kualitas ruang.<sup>7</sup>

#### 4. Wilayah

Dalam UUPR, pasal 1 butir 17 di kemukakan: “wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional”.<sup>8</sup>

#### 5. Kawasan pedesaan

Yang dimaksud dengan kawasan pedesaan dalam konsep penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Ed. Pertama, Jakarta:Penerbit Prenadamedia Group, 2014). h. 8.

<sup>8</sup>Undang-Undang No.26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang* Pasal 1 ayat 17.

<sup>9</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 27.

#### 6. Kawasan perkotaan

Yang di maksud dengan kawasan perkotaan dalam konsep penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

#### 7. Kawasan lindung

Yang di maksud dengan kawasan lindung dalam konsep penataan ruang adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.<sup>11</sup>

#### 8. Kawasan budidaya

Yang di maksud dengan kawasan budidaya dalam konsep penataan ruang adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.<sup>12</sup>

### **B. Konsep Dasar Hukum Tata Ruang**

Mochtar Koesmaatmadja mengonstatir bahwa tujuan pokok penerapan hukum adalah ketertiban. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur, disamping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 27.

<sup>11</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 27..

<sup>12</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 24.

<sup>13</sup> Mochtar Koesoemaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 56.

Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ... “

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Alinea ke 4, berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat“. Kalimat tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.<sup>15</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila kita cermati dengan seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya kerusakan terhadap lingkungan hidup.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 28.

<sup>15</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 28.

<sup>16</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 28.

Upaya pelaksanaan perencanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut hemat penulis melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalam mengomentari konsep Roscoe Pound, Mochtar Koesoemadmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah menjadi sarana pembangunan. Disini berarti hukum haruslah mendorong proses modernisasi.<sup>18</sup> Artinya hukum yang dibuat haruslah dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang.<sup>19</sup>

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

---

<sup>17</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 29.

<sup>18</sup>Mochtar Koesmaatmadja, *Konsep- Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung, 2002), h. 200.

<sup>19</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 29.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>20</sup>

### ***C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)***

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke

---

<sup>20</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 29.

dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut.

Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Menurut Daud Silalahi, yang mengemukakan bahwa rencana tata ruang



wilayah merupakan suatu pengertian yang secara eksplisit tersirat cakupan yang luas mengandung arti bahwa:

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk bagian hubungan yang bersifat abadi.
4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
5. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
6. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air adalah yang berada didalam bumi.

Keenam point tersebut di atas secara tersirat mengandung pemaknaan terhadap ruang suatu wilayah yang perlu ditata khususnya yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terdapat dalam suatu wilayah.<sup>21</sup>

Solihin memberikan pengertian rencana tata ruang wilayah adalah Mengatur, mengelolah, menangani, mempotensikan segala hal yang ada di atas bumi, air dan ruang angkasa untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal dalam

---

<sup>21</sup>Daud silalahi, *hukum lingkungan, dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia*, alumni, 2001, h. 82.

ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penggunaan ruang.<sup>22</sup>

Sugianto juga menyatakan bahwa pengertian perencanaan rencana tata ruang wilayah mencakup:

Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna udara dan ruang angkasa dan tata guna sumber daya alam lainnya yang disesuaikan dengan fungsi pertahanan keamanan subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk perencanaan rencana tata ruang wilayah. Tinjauan rencana tata ruang wilayah yang terencana sangat komperatif dengan pemanfaatan ruang yang dikembangkan. Menurut Sugianto pemanfaatan ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai:

1. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah.
2. Segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna, tata guna air, tata guna udara dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Berarti pemanfaatan suatu rencana tata ruang wilayah juga berkaitan dengan bentuk-bentuk pengendalian atau pengawasan terhadap ruangan yang telah direncanakan sesuai dengan bentuk pengendaliannya yaitu melakukan berbagai bentuk aplikasi pengawasan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Solihin, *pengaturan hukum rencana tata ruang wilayah dan interior perkotaan*, gramedia pustaka, 2004, h. 18.

<sup>23</sup>Sugianto, *teori-teori hukum tata ruang*, rajawali press, 2004, h. 82.

Hermawan Sumantri menjelaskan bahwa: Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam penataan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Demikian pula setiap bentuk pengawasan seyogyanya dilakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku dengan memperhatikan rencana tata ruang yang dibedakan tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah propinsi daerah, tata ruang wilayah kabupaten/ kecamatan.

Bentuk kongkrit dari suatu rencana tata ruang wilayah dalam suatu peraturan mengenai rancangan tata ruang, maka dapat dipahami bentuk–bentuk rencana tersebut berdasarkan penetapan tata ruang wilayah yang memiliki strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara meliputi:

1. Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional.
3. Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu.

Demikian pula dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional berisi:

1. Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional.
2. Norma dan kriteria pemanfaatan ruang.
3. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan rencana tata ruang nasional yang menjadi pedoman untuk melakukan rencana tata ruang wilayah adalah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan:

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.
3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.
4. Rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan wilayah kabupaten / Kotamadya daerah tingkat II.

Berdasarkan uraian di atas maka penilaian mengenai suatu rencana tata ruang dalam implementasi rencana tata ruang wilayah bagi suatu wilayah propinsi, akan mengacu kepada tinjauan yang berisi tentang:

1. Arahan pengolahan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
2. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan kawasan tertentu.
3. Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, budaya terpadu dan kawasan lainnya.
4. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan.
5. Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan.
6. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.
7. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Hermawan sumantri, *Hukum Tata Ruang Perkotaan*, (PT. Alumni Bandung, 2004), h. 48.

Nurhadi menyatakan bahwa: Rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya agar bentukbentuk rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekwensi logis bagi masyarakat memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.<sup>25</sup>

Atas uraian dan tinjauan yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rencana tata ruang wilayah diartikan sebagai bentuk perumusan kebijakan pokok dalam memanfaatkan ruang dalam suatu wilayah yang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antara sektor dalam mengekskiskan pentingnya rencana tata ruang wilayah.

#### ***D. Rencana Penataan Ruang***

Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa rencana, dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar reflex yang berdasarkan perasaan semata. Tetapi yang penting, perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan atau kebijaksanaan- kebijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Nurhadi, *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan*, (Tarsito, 2002), h. 70.

<sup>26</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 24-25.

Pada negara hukum dewasa ini, suatu rencana tidak dapat dihilangkan dari hukum administrasi. Rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib dan teratur. Rencana yang demikian itu dapat dihubungkan dengan stelsel perizinan (misalkan suatu perizinan pembangunan akan ditolak oleh karena tidak sesuai dengan rencana peruntukan).<sup>27</sup>

Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah *species* dari *genus* kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.<sup>28</sup>

Saul M. Katz, mengemukakan alasan atau dasar dari diadakannya suatu perencanaan adalah :

1. Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan.
2. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi, dengan perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

---

<sup>27</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 25.

<sup>28</sup>Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. h. 25.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.<sup>29</sup>

Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyalurkan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi meningkatkan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang

Dalam klasifikasi perencanaan tata ruang dikenal adanya perencanaan tata ruang kota, dan secara umum perencanaan tata ruang kota selalu diidentifikasi ke dalam perencanaan fisik semata, yakni gambaran dari perencanaan kota, taman,

---

<sup>29</sup>Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997, h. 34.

bangunan perumahan, bangunan perkantoran dan lain sebagainya. Namun dengan semakin pesatnya perkembangan zaman perencanaan fisik sudah tidak tepat lagi oleh karena dalam proses pembentukan perencanaan kota tidak hanya diperlukan suatu perencanaan fisik semata. Dalam kenyataan di lapangan, kegiatan suatu perencanaan kota akan di hadapkan pada berbagai permasalahan social, lingkungan, ekonomi, hukum, politik dan permasalahan-permasalahan lainnya. Salah satu contoh adalah seorang perencana yang akan melakukan kegiatan pembangunan pusat perbelanjaan, maka ia tidak hanya melakukan perencanaan desain fisik semata, akan tetapi ia harus melakukan pengoptimalisasian dari akibat yang akan di timbulkan terhadap lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial masyarakat di sekitar.

#### ***E. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penataan Ruang***

Wewenang pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota dalam bidang penataan ruang, secara terperinci tertuang dalam pasal 11 ayat (1) hingga ayat (6) Undang-undang penataan ruang (UUPR), sebagai berikut:

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
  - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;
  - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
  - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten kota; dan
  - d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.



2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Perencanaan tata ruang kabupaten/kota;
  - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
  - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
  - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
  - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
  - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
  - d. Pengendalian pemanfaatn ruang kawasan strategis kabupaten/kota.<sup>30</sup>

Penjelasanya menyatakan: “cukup jelas”

Ketentuan pasal 11 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUPR tersebut, menegaskan adanya tiga kelompok wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang, yaitu:

1. Wewenang dalam *penyelenggaraan* penataan ruang, yang merupakan kelompok wewenang yang bersifat strategis.
2. Wewenang dalam *pelaksanaan* penataan ruang, yang merupakan kelompok wewenang yang lebih bersifat teknis operasional.
3. Wewenang berkaitan dengan penataan ruang *kawasan strategis*, yang merupakan kelompok wewenang yang mengandung sifat strategis dan sifat

---

<sup>30</sup>A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Ed. Pertama, Jakarta:Penerbit Prenadamedia Group, 2014). h. 124-125.

teknis sekaligus. Penetapan dan pengendalian mengandung sifat strategis, perencanaan, dan pemanfaatan lebih bersifat teknis.<sup>31</sup>

Selanjutnya, pasal 11 ayat (4) UUPR menyatakan: “dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk peleksanaanya”. ketentuan ini sebenarnya tidak memeberikan atau menambah ketiga kelompok wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, tetapi meletakkan persyaratan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan wewenang pentaan ruang yang ada padanya, yakni harus mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis yang telah di terapkan oleh pemerintah dan/ataupemerintah daerah provinsi.<sup>32</sup>

Lebih lanjut pasal 11 ayat (5) UUPR menyatakan: “dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

1. Menyebarluaskan informasi yang berkaitandengan rencana umum dan rencana perinci Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan Pentaan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
2. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.”<sup>33</sup>

Adapun ayat (6) pasal 11 menyatakan: “dalam hal pemerrintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar peleyanan minimal bidang penataan

---

<sup>31</sup>A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Ed. Pertama, Jakarta:Penerbit Prenadamedia Group, 2014). h. 125.

<sup>32</sup>A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. h. 125-126.

<sup>33</sup>A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. h. 126.

ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian usai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan 11 ayat (5) huruf b UUPR, dasar pemikirannya sama dengan pasal 10 ayat (6) untuk pemerintah daerah provinsi, yakni memberikan contoh pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, antara lain keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Adapun mutu pelayanan dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.” Selanjutnya, penjelasan ayat (6) pasal 11 menyatakan: “pemerintah daerah provinsi mengambil langkah penyelesaian dalam bentuk pemenuhan standar dalam pelayanan minimal apabila setelah melakukan pembinaan, pemerintah daerah kabupaten/kota belum juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah.”<sup>34</sup>

Bila disimak ketentuan pasal 11 ayat(5) dan ayat (6) UUPR tersebut, secara substansial sebenarnya juga tidak memberikan atau menambah wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penataan ruang, melainkan meletakkan kewajiban yang harus dilaksanakan (diikuti) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan penataan ruang yang telah diberikan oleh UUPR kepadanya, dengan konsekuensi tertentu (semacam administratif). Ketentuan tersebut juga kembali menegaskan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam penataan ruang, dan dijadikan sebagai indikator standar pelayanan minimal dengan ukuran tertentu (frekuensi keikutsertaan masyarakat). Artinya, bahwa semakin tinggi frekuensi keikutsertaan masyarakat tersebut, semakin baik pula pemenuhan standar

---

<sup>34</sup>Undang-Undang tentang *Penataan Ruang* Pasal 11 ayat (5) dan (6).

pelayanan minimal dalam penataan ruang. Secara umum, kewenangan (wewenang-wewenang) pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota pada dasarnya sama, yakni sama-sama memiliki wewenang atribusi (asli) yang dapat di tambah dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, dan dengan mekanisme serta persyaratan yang sama pula. Hal ini mengandung pengertian bahwa hal tertentu, penetapan RTRW kota disertai dengan persyaratan khusus sesuai dengan tuntutan kehidupan di wilayah perkotaan. Mengenai pelimpahan wewenang tersebut, terkandung dalam pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 10 ayat (4) UUPR yang menegaskan bahwa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dekonsentrasi diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.” Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat di laksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.”<sup>35</sup>

Pentingnya keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam penataan ruang tersebut dapat di pahami oleh karena masyarakat merupakan sasaran sekaligus selaku riil dalam mewujudkan RTRW. “peran serta masyarakat merupakan hal yang yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang. Masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang.” Kiranya di pahami, bahwa masyarakat sebagai objek dan pelaku (yang terkena penataan di sini) tidak hanya untuk menikmati nilai tambah yang timbul akibat adanya perencanaan penataan ruang (RTRW), tetapi yang lebih penting pula adalah menjadi pihak yang memikul beban kerugian yang menimpa mereka sebagai

---

<sup>35</sup>Undang-Undang tentang *Penataan Ruang* Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) tentang “Dekonsentrasi” dan “Tugas Pembantuan”, dalam buku A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang. h. 127.

akibat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan yang tidak mengakomodasi atau bahkan mengabaikan kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran penataan itu. Seperti diketahui, dan juga banyak disaksikan dalam kenyataan, bahwa penataan ruang selalu (atau umumnya) membuahkan “penggusuran” penduduk setempat dengan atau tanpa di rencanakan. Salah satu contoh terutama bagi kalangan civitas akademik Unhas yaitu pengadaan lokasi pembangunan kampus dan perumahan dosen tamalanrea (di area 70-an). Fenomena penggusuran atau tergusurnya penduduk sebagai dampak penataan ruang di wilayah RI ini masih tetap merupakan tantangan tersendiri dalam setiap perencanaan RTRW/RTRK (yang dapat berupa Rencana Tata Ruang Kota/desa). Penataan ruang di kali code di Yogyakarta ( pada dekade 90-an) yang tidak disertai dengan penggusuran penduduk setempat, untuk sementara dapat dipandang sebagai suatu pengecualian, dan baik untuk di jadikan pembanding dalam penataan ruang di wilayah lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, keikutsertaan masyarakat harus dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekedar formalitas atau justifikasi belaka. Peranan serta secara nyata masyarakat dalam penataan ruang ini juga turut menentukan dapat tidaknya terwujud tujuan penataan ruang itu sendiri terutama bagi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, mengingat seluruh wilayah nasional sudah terbagi habis dalam wilayah-wilayah kabupaten/kota. sejalan dengan amanat pasal 18 ayat (1) UUD 1945.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. h. 127-129.

## ***F. Pengawasan Tata Ruang dan Ketentuan Pidana***

### **1. Pengawasan**

Pembangunan sebagai organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta menegakkan hukum, dalam rangka memantapkan pelaksanaan penataan ruang, melakukan pembinaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat.
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan hukum, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan.<sup>37</sup>

Perencanaan pemerintah memberikan pembinaan tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan tata ruang yang terdapat di suatu wilayah. Konsekuensi dari adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Disamping itu, apabila izin yang telah diberikan dan dicabut atau dibatalkan oleh pemerintah, maka apabila dapat dibuktikan bahwa tata ruang tersebut telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak.

### **2. Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang memanfaatkan tata ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan penjara

---

<sup>37</sup>Supriadi, *Hukum Agraria*.(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 288

paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (Satu milyar rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)<sup>38</sup> dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

---

<sup>38</sup>Undang- Undang No 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang* Pasal 69 dan 70.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia alam dan dunia sosial. Penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.<sup>1</sup>

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif yang mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini, menggambarkan tentang terhadap fungsi pengawasan pemerintah daerah terkait penataan ruang dan wilayah ditinjau dari prespektif hukum nasional dan hukum Islam (studi kasus di Kabupaten Bulukumba).

---

<sup>1</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. 1.,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20014), h. 8.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Pres, 1984), hlm. 10.



## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Bulukumba, terkhususnya di Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kab. Bulukumba dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan guna untuk memperbaiki penataan ruang yang kurang tertata sebagaimana semestinya sehingga tidak terjadi lagi kemacetan, banjir dan hal-hal yang tidak diinginkan.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

#### 1. Pendekatan Syar'i

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada Hukum Islam dengan melihat apa yang ada di dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama.

#### 2. Pendekatan Yuridis Normatif

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

#### 3. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan metode ini yaitu melihat dari kejadian atau peristiwa yang muncul dalam masyarakat seperti media masa tentang kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi.

### C. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian, adapun yang menjadi data primer adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer ini jumlahnya 3 orang *informan*. Dari 3 orang tersebut terdiri dari Dinas Penataan Ruang, Anggota DPRD dan Inspektorat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel I

*Tabel informan :*

NO	NAMA	INFORMAN	KET
1	Dinas Penataan Ruang	1 orang	
2	Anggota DPRD	1 orang	
3	Inspektorat	1 orang	
Jumlah		3 orang	

Berdasarkan rincian sumber data tersebut, peneliti memilih *sampel* menggunakan teknik *sampel purposive*. Teknik sample ini peneliti pilih berdasarkan pemahaman dan ilmu yang dimiliki *informan*, sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan *valid*. Alasan memilih 3 informan ini karena, mereka semua berada di Kabupaten Bulukumba.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi rujukan kedua dari penelitian, adapun data sekunder tersebut ialah studi kepustakaan seperti buku-buku atau sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Dalam teknik ini, pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

#### 2. Wawancara

Adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

#### 3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kab. Bulukumba, seperti tulisan yang berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 93.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan**

Teknik Pengolahan merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis. Adapun termasuk dalam teknik pengolahan, yaitu:

- a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

### **2. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Kondisi Geografis Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bulukumba berada di 153 KM dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian Selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km<sup>2</sup> atau 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni daratan tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, daratan rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05°20' – 05°40' LS dan 119°58' – 120°28' BT dengan batas-batas yakni:

1. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai;
2. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar;
3. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores;
4. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng;

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu kecamatan Ujungbulu (Ibukota kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir sbagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 (dua) buah pulau yang

terdapat pada wilayah Desa Bira Kecamatan Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak berpenghuni).

Secara keseluruhan panjang garis pantai 128 km dengan luas laut  $\pm 204,83 \text{ km}^2$  sangat menunjang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan.

Dari 10 kecamatan yang ada, semua dapat ditempuh dengan mudah dan ditunjang dengan infrastruktur jalan kabupaten yang memadai. Kecamatan yang terjauh dari Ibukota kabupaten yakni Kecamatan Kajang.

### ***B. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba***

Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Padahal baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Melalui Tata Ruang Wilayah ini penggunaan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penggunaan ruang. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa struktur ruang memuat susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

Sementara itu pola ruang memuat distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah menimbulkan

berbagai permasalahan lebih lanjut, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan antar sektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antardaerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup.

Bupati Bulukumba selaku kepala pemerintahan memiliki perananan sangat penting dalam Penataan Ruang dan Wilayah diantaranya, yaitu mengadakan pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan Ruang dan wilayah serta mengadakan kerja sama Penataan Ruang antar kabupaten lain. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu membuat perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta menyebar luaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana princi Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang dan Wilayah di kabupaten Bulukumba.

Untuk mewujudkan atau terselenggaranya Penataan Ruang dan Wilayah yang sesuai dengan aturan di Kabupaten Bulukumba maka dibutuhkan peran serta masyarakat yang merupakan mitra pemerintah dalam Penataan Ruang. Kiranya dipahami bahwa masyarakat sebagai objek dan pelaku tidak hanya menikmati nilai tambah yang timbul akibat adanya perencanaan Penataan Ruang dan Wilayah, tetapi yang lebih penting adalah menjadi pihak yang memikul beban kerugian yang menimpah mereka sebagai akibat penetapan rencana Penataan Ruang dan Wilayah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Penataan Ruang keikutsertaan masyarakat harus dalam artian yang sesungguhnya bukan sekedar formalitas. Peranan serta secara nyata masyarakat dalam penataan ruang ini juga turut menentukan dapat tidaknya terwujud tujuan penataan ruang itu sendiri terutama bagi Penataan Ruang dan Wilayah kabupaten Bulukumba.

Fungsi pemerintah daerah dalam penataan Ruang dan wilayah khususnya di Kabupaten Bulukumba, menurut Pemerintah Bulukumba terlebih khusus anggota DPRD bagian komisi C menegaskan bahwa fungsi DPRD dalam mengawasi Penataan Ruang dan Wilayah yaitu tugas DPRD 3 yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, jadi DPRD mempunyai kebijakan sebagai pemerintah, yang pertama bahwa segala sesuatu yang ingin dilakukan harus sesuai dengan payung hukum yang ada dalam hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada di atasnya, yang kedua program Pemerintah yang ada kaitanya dengan penataan ruang semuanya harus dibicarakan melalui DPRD karena ketika Pemerintah berbicara tentang program pelaksanaan pembangunan, pemerintah sebagai pengguna anggaran secara otomatis harus meminta persetujuan dari DPRD karena DPRD yang membahas anggaranya.<sup>1</sup>

Program itu merupakan skala prioritas memang suatu kebutuhan yang besar bagi DPRD tidak ada persoalan. Anggaran yang sudah rasio dan di harmonisasi akan memberikan persetujuan, yang ketiga setelah di berikan anggaran berjalan sesuai program maka tugas anggota DPRD melakukan pengawasan, mengawasi jalanya pembangunan mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disetujui oleh anggota DPRD agar pelaksanaan itu tercapai dan terlaksana sehingga masyarakat menikmati dalam waktu yang lebih lama.<sup>2</sup>

Bulukumba sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) tentang rencana tata ruang wilayah Kab. Bulukumba, jadi di Bulukumba tidak boleh

---

<sup>1</sup>H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

<sup>2</sup>H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).



membangun di sembarang tempat harus berdasarkan dengan tata ruang yang telah ditetapkan, contoh penggalian golongan C tidak semua wilayah bulukumba bisa melakukan penggalian golongan C karena semua sudah di petakan itu telah di atur dengan tata ruang wilayah.<sup>3</sup>

Kebijakan yang dilakukan penataan ruang untuk mengatasi banjir dan macet yaitu Pemerintah sudah membagi bagian zonasi, sehingga skala kemacetanya belum signifikan, dan skala banjir belum mengkhawatirkan, adapun rencana untuk mengatasi banjir penataan ruang ingin membangun serapan air.<sup>4</sup>

Adapun bentuk Kebijakan penataan ruang dalam melaksanakan pengawasan yaitu penataan ruang memiliki tim pengawasan pembangunan untuk mengawasi pembangunan, walaupun ada investor dari luar harus ada izin dari penataan ruang.<sup>5</sup>

Tujuan dan harapan tata ruang yang ingin di capai kedepanya yaitu, bagaimana melihat bulukumba kedepan bisa bersaing dengan kabupaten atau kota yang ada di Sul-Sel, sedangkan harapanya ingin lebih bagus dalam pekerjaan dan butuh dukungan dari masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut pihak penataan ruang yang berperan penting dalam pengawasan yaitu semua harus berperan penting dalam hal pengawasan dan masyarakat harus memberi dukungan sehingga bisa dicapai visi misi bupati bulukumba.<sup>7</sup> Produk yang

---

<sup>3</sup>H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

<sup>4</sup>Darvin, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, *Wawancara* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ( 17 Juli 2017).

<sup>5</sup>Darvin, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, *Wawancara* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ( 17 Juli 2017).

<sup>6</sup>Darvin, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, *Wawancara* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ( 17 Juli 2017).

<sup>7</sup>Darvin, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, *Wawancara* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ( 17 Juli 2017).

telah di capai oleh DPRD bersama kepala daerah yaitu, rencana tata ruang wilayah itu adalah produk DPRD, yang di atur dalam PERDA No 21 tahun 2012 tersebut, Produk DPRD mengenai tata ruang harus di setujui oleh Bupati.<sup>8</sup>

Tujuan atau misi yang ingin di capai DPRD Kabupaten Bulukumba, DPRD berharap di semua wilyah ini berdasarkan Tata Ruang wilayah yang sudah di tentukan agar dapat melakukan pembangunan secara berkesinambungan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata yang sifatnya skala prioritas.<sup>9</sup>

Dari DPRD Bulukumba sendiri berharap dan akan mendorong pemerintah melakukan program-program yang sifatnya mensejahterakan masyarakat dani DPRD akan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah kita akan bagi secara merata dalam melaksanakan pembangunan tersebut di semua wilayah, contoh di Gantarang Kindang adalah pertanian yang akan mendorong pemerintah setempat supaya bisa meningkatkan pendapatan petani dan tentunya masyarakat membutuhkan adanya kebutuhan yang menunjang dalam hal pertanian, contohnya pupuk, bibit tanaman dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pupuk dengan harga yang murah dan mudah di dapatkan di wilayah bulukumba tersebut. Perda yang ada di Kabupaten Bulukumba lahir bukan inisiator DPRD tapi inisiator pemerintah, berarti

---

<sup>8</sup>H. Patudangi, Wakil Kerua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

<sup>9</sup>H. Patudangi, Wakil Kerua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

<sup>10</sup>H. Patudangi, Wakil Kerua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

ini adalah kebutuhan masyarakat Bulukumba dan kebutuhan wilayah Bulukumba yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulukumba sehingga Perda wilayah pemerintah mendorong DPRD agar transparansi dalam penggunaan anggaran khususnya di sector Tata Ruang dan Wilayah.<sup>11</sup>

Melihat kondisi Kabupaten Bulukumba yang cukup memprihatinkan dalam hal Tata Ruang dan Wilayah khususnya dalam sektor tambang galian C luar biasa rusaknya, contoh terkecil yang ada di Kecamatan Ujung Ioe, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Gantarang yang sangat berdampak negatif baik lingkungan maupun masyarakat setempat. Sehingga DPRD Bulukumba bekerja ekstra keras serta menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi utamanya dan memegang teguh amanah masyarakat yang telah dimandatkan kepada anggota DPRD.<sup>12</sup>

DPRD Kabupaten Bulukumba hanya mengawasi jalanya pemerintahan, utamanya jalanya pembangunan di wilayah bulukumba yang merupakan salah satu tugas DPRD. Tetapi DPRD melakukan pengawasan ketika ada laporan dari masyarakat dan memaanggil dinas yang terkait diadakan pertemuan untuk di mintai pendapat selaku pengguna anggaran dengan bukti yang ada.<sup>13</sup>

Adapun Bentuk pengawasan yang di lakukan Inspektorat dalam mengawasi Tata Ruang Wilayah, dimana Inspektorat setiap tahun melakukan pengawasan mengenai ke uangnya, aspek fisik pekerjaan insfrastruktur dan sumber dayanya. terkait tehnik pengawasan Tata Ruang Dan Wilayah biasanya melibatkan pada saat

---

<sup>11</sup>H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

<sup>12</sup>H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

<sup>13</sup>H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

penyusunan RTRW serta melibatkan masyarakat setempat agar melaporkan ketika ada pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW.<sup>14</sup>

Kebijakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengawasi penataan ruang dan wilayah, terkait dengan RTRW inspektorat biasanya mengadakan sampling terkait dengan IMB. Kontribusi yang dilakukan Inspektorat terhadap pengawasan Tata Ruang Dan Wilayah dengan presentase sangat besar karena melakukan pengawasan terkait kebijakan penganggaran inspektorat.<sup>15</sup>

Peraturan yang mendukung Inspektorat dalam melakukan pengawasan penataan Ruang wilayah, yaitu peraturan Bupati yang telah dibuat yang sesuai dengan regulasi pembagian wilayah dan kebijakan pengawasan. Bentuk keberhasilan yang telah dicapai selama dalam pengawasan Penataan Ruang dan Wilayah, dimana masyarakat tidak akan melakukan pembangun jika tidak sesuai dengan RTRW tersebut.<sup>16</sup>

### ***C. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Bulukumba dalam mengawasi Penataan Ruang dan Wilayah .***

Di Bulukumba legalisasi produk pengendalian tata ruang dan wilayah dinilai agak lamban, hal ini menunjukkan bahwa produk pengendalian tersebut belum memiliki kedudukan yang berarti dalam proses pembangunan. Lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan merupakan salah satu kendala dalam implementasi

---

<sup>14</sup>H. Muh. Yusuf Sommeng, Kepala Inspektorat Bulukumba, *Wawancara* di Inspektorat Bulukumba, ( 24 Juli 2017).

<sup>15</sup>H. Muh. Yusuf Sommeng, Kepala Inspektorat Bulukumba, *Wawancara* di Inspektorat Bulukumba, ( 24 Juli 2017).

<sup>16</sup>H. Muh. Yusuf Sommeng, Kepala Inspektorat Bulukumba, *Wawancara* di Inspektorat Bulukumba, ( 24 Juli 2017).

rencana tata ruang kota yang perlu dicermati. Suatu produk rencana tata ruang kota yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung mekanisme pengendalian dan pengawasan pembangunan yang jelas. Selain itu perlu didukung adanya ketentuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan bonus bagi yang taat terhadap peraturan.

Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan wilayah yang terjadi jarang sekali dikenakan teguran, paksaan, apalagi sanksi. Bagi yang mentaati peraturan dan rencana tata ruang dan wilayah juga tidak diberikan penghargaan. Akibatnya pelaku pembangunan cenderung untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum yang lebih luas. Dengan tidak diberlakukannya sistem insentif dan disinsentif, kecenderungan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang semakin merebak.

Kendala yang di hadapi pemerintah kabupaten Bulukumba khususnya DPRD Bulukumba dalam pengawasan terbilang tidak terlalu signifikan, Di katakana sulit ya tidak, dikatakan tidak ya sulit delematislah, salah satu contoh perda rokok, ini perda rokok sudah di setuju tapi aplikasinya sampai kelapangan belum berjalan sesuai dengan harapan kita, tapi pelan tapi pasti pemerintah sudah meninda lanjuti sudah melaksanakan contoh di RS tidak boleh lagi merokok pemerintah sudah menata ruang bahwa di wilayah ini tidak boleh merokok tugas Satpol PP mengawasi agar tidak ada yang melanggar Perda, siapapun pelanggarnya di berikan pembinaan dulu sampai 3 kali mungkin di tahun yang akan datang akan di dijalankan secara efektif bagi masyarakat yang melanggar Perda tersebut akan dikenai denda atau kurungan penjara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, *Wawancara* di Gedung DPRD Bulukumba, (19 Juli 2017).

Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif juga tidak menyediakan dokumen survei awal (dokumen perencanaan) untuk menopang pelaksanaan RTRW dan tindak lanjut dari rencana pembentukan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih sementara proses rancangan dari eksekutif juga menjadi hambatan dalam pengawasan tata ruang dan wilayah yang mengatur lebih spesifik penataan ruang dan wilayah sebagai penopang pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah kehilangan besar dengan adanya bangunan pusat bisnis dan pertokoan serta permukiman baru yang tidak menyesuaikan ketentuan dari perizinan saat melakukan pembangunan. Terkadang karena tidak adanya lahan lain untuk pembangunan sehingga mengorbankan lahan publik digunakan untuk pusat bisnis. Sehingga hal ini menjadi potret masalah ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Sebagai penyelesaiannya maka Pemerintah Kabupaten seharusnya mengevaluasi sejumlah daftar perizinan IMB untuk pendirian bangunan-bangunan baru.

Pengawasan Tata Ruang dan Wilayah Kawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tapi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk berperan penting dalam pelaksanaan pengawasan Tata Ruang dan Wilayah. Maka semua pihak harus terlibat, sebagai pihak yang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apabila terjadi hambatan dalam pengawasan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah Kabupaten Bulukumba sebagai penunjang dalam pengawasan Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba. Sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut harusnya melibatkan semua elemen

masyarakat serta pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata, arah kebijakannya lebih berusaha untuk dapat menerapkan ketentuan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bulukumba<sup>18</sup>

**D. *Manfaat Penataan Ruang dan Wilayah Dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Bulukumba.***

Keberadaan ruang kota atau wilayah, tidak hanya dilihat dari ciri-ciri morfologinya saja, tapi juga dilihat dari fungsi yang melekat padanya. Ruang Islami juga bisa dilihat dari aktivitas Islami yang ada di dalamnya. Aktivitas Islami ini muncul dari budaya Islami yang terbentuk dari ajaran Islam yang dianut oleh masyarakatnya.

Ruang selalu menjadi alat utama dalam mempraktikkan kekuasaan. Ruang pada kenyataannya adalah tempat di mana kekuatan kekuasaan diujikan untuk mengatur manusia-manusia di dalamnya atau dalam bahasa Foucault sebagai institusi untuk mendisiplinkan masyarakat. Ruang adalah institusi yang menjadi alat untuk mendisiplinkan masyarakat.

Dalam proses penciptaan manusia Allah telah memberikan kelengkapan hidup berupa akal pikiran, hati dan perasaan serta kelengkapan fisik biologis dimaksudkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Fungsi dan tugas yang harus dijalankan manusia antara lain berupa menjalankan tugas pembangunan, memelihara dan mengelola lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Darvin, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, *Wawancara* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ( 17 Juli 2017).

### 1. Manusia Dan Tugas Pembangunan.

Dalam Al-Quran maupun Al-Hadits telah banyak disebut mengenai manusia menyangkut proses terjadinya, statusnya, hak dan kewajibannya, serta sifat-sifat dan kecenderungan-kecenderungannya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaannya sehingga diberikan kemampuan yang lebih dibanding dengan makhluk lainnya, bahkan dengan malaikat sekalipun. Kesempurnaan manusia itu ditandai dari posisinya di hadapan Allah, yaitu pada satu sisi manusia adalah kecil dan sangat lemah karena ia sebagai hamba atau abdi, tetapi dalam posisi lain dalam hubungannya dengan sesama ciptaan Allah manusia mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia yakni sebagai Khalifah-Nya.

Untuk menunjukan bahwa manusia adalah hanya sebagai hamba atau abdi-Nya yang lemah tak berdaya serta diciptakannya manusia dan jin adalah hanya untuk menyembah kepada Allah. Maka manusia diberi peran besar sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Terjemahnya:

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"*



*Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>19</sup>*

Sehubungan dengan ditunjuknya manusia sebagai khalifah Allah, dengan argumentasi sebagaimana oleh M. Quraish Shihab: “bahwa makhluk ini, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan para pemrotes yaitu kemampuan mengetahui fungsi benda-benda alam. Masih dalam hal keunggulan manusia dari pada makhluk lain, Murtadha Muthahhari juga mengatakan sebagai berikut : “manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Bedanya adalah manusia lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih tinggi keinginannya. Kekhasan ini yang dimiliki manusia membedakan manusia dan binatang, dan membuat manusia lebih unggul dari pada binatang lainnya.<sup>20</sup>

Karena keunggulan itu, Allah memberi peran kepada manusia sebagai wakil-Nya di mana ia diberi tanggung jawab untuk atas nama Allah menegakkan hukum-hukumNya di muka bumi sebagai imbalannya seluruh alam dan isinya diserahkan pengelolaannya dan pemanfaatannya serta pemeliharaannya kepada manusia. Namun demikian pengelolaan alam yang dimaksudkan bukanlah dalam arti sebagai penakluk atas yang di taklukan. Dalam persoalan demikian M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa: “hubungan manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukan atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena, kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugrah Allah SWT. Manusia mengembangkan tugas

---

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran 2012), h. 6.

<sup>20</sup>Murthadlo Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2002 ). h.,1.

membangun dunia ini dan memeliharanya sesuai dengan hukum-hukumnya yang berlaku dalam keseluruhannya secara utuh (tidak hanya dalam bagiannya secara parsial semata) demi usaha mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi tersebut. Di sini letak relevansi keimanan untuk wawasan lingkungan.<sup>21</sup>

Menurut Yusuf Al Qaradhawi tentang peranan manusia tadi dikategorikan sebagai tujuan-tujuan yang sangat mulia di tengah-tengah kehidupan manusia, hal itu merupakan hikmah Allah kepada para mukallafin yang akhirnya dibagi menjadi tiga tujuan yaitu:

1. Untuk mengabdikan pada Allah. Ibadah ini meliputi segala sesuatu yang disenangi Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan dan perbuatan. Maka dalam konteks ini, sebenarnya bentuk ibadah itu mencakup semua aspek kehidupan.
2. Sebagai wakil (Khalifah Allah) di atas bumi. Supaya praktik kekhilafahan ini terwujud, mereka dituntut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta meyiarkan kebaikan dan kemaslahatan.
3. Membangun peradaban di muka bumi. Dalam arti mengandung pesan pada manusia untuk membangun kehidupan.<sup>22</sup>

Kemampuan manusia melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan untuk membangun kehidupan di muka bumi ini, merupakan pengejawantahan atau refleksi dari keberimanan seseorang sebagai hamba Allah. Dari sini lah tergambar dengan jelas tentang berlangsungnya hubungan dua dimensional yakni secara vertikal dan

---

<sup>21</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h, 479.

<sup>22</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj : Abdullah Hakam Shah, Dkk, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2002).h, 24-25.

horizontal yang dijalankan oleh manusia. Hubungan vertikal yang dimaksud adalah kemampuan manusia dalam menjalankan perintah Allah, dan hubungan horizontal adalah kemampuan manusia melakukan hubungan dengan alam lingkungan termasuk sesama manusia.<sup>23</sup>

Di dalam proses membangun ini, manusia tidak dapat berjalan sendiri atau melepas keterkaitannya dengan alam di luar dirinya baik yang bersifat *biotic* maupun *abiotic* atau benda hidup atau benda tak hidup. Faktor-faktor alam ini sebagai sesama makhluk ciptaannya ikut andil di dalam menentukan keberhasilan pembangunan dimana manusia sebagai yang ditugasi untuk mengelolanya. disinilah perlu terjadi interaksi positif antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam dan antara manusia dengan Allah SWT. Bila kondisi demikian ini terwujud, maka tidak mustahil semua akan saling membantu serta bekerja sama dan tentunya Tuhan meridhainya. Perwujudan hubungan interatif yang meliputi semua unsur kehidupan dalam melakukan pembangunan yang berlangsung secara utuh itulah, kemudian disebut pembangunan yang *holistik*.

## 2. Manusia Sebagai Pemelihara dan Pengelola Lingkungan.

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa: segala wujud di dunia ini harmonis, dan evolusinya menuju ke pusat yang sama. Segala yang diciptakan tidak ada sia-sia, dan bukan tanpa tujuan. Dunia ini di kelola dengan serangkaian sistem yang pasti dikenal sebagai hukum. Di antara makhluk yang ada, manusia memiliki martabat yang khusus, dan misi khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Daud Effendy, "*manusia, lingkungan dan pembangunan prospektus islam*" (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah),h. 111.

<sup>24</sup>Murthadlo Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta*,, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2002 ). h, 57.

Dengan menyimak pernyataan tersebut diperoleh suatu pemahaman : pertama, kehidupan ini adalah suatu yang harmonis, artinya antara sesama makhluk terjadi hubungan yang berpadan dan berkeseluruhan. Kedua, keseluruhan proses kehidupan ini semuanya bergerak menuju dan bertemu ke pusat yang sama yaitu *liqo illah* (menuju Allah). Ketiga, kehidupan dan alam semesta ini sengaja diciptakan Allah dengan kesemuanya memiliki nilai guna dan manfaat serta bertujuan (teologis). Keempat, alam semesta ini merupakan suatu sistem bergerak sesuai dengan hukum-hukum Allah (*sunnatullah*). Kelima, mengenai manusia sebagai makhluk yang paling bermanfaat (mewah). Pada dirinya diberikan tanggung jawab yakni berupa tugas dan misi khusus. Dari kelima hal yang disebutkan tadi, tergambar bahwa dengan mengingat fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi maka disitulah manusia memiliki peran sentral di dalam memelihara dan mengelola alam. Di dalam memelihara dan mengelola alam beserta seluruh isinya, manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya sendiri, melainkan harus bersandar pada pesan- pesan ilahi, atau di dalam bertindak memelihara dan mengelola lingkungan alam itu adalah atas nama Allah SWT.

Fungsi kekhalifahan yang harus diperankan manusia terhadap lingkungan alam semestinya harus dipahami sebagai hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Petunjuk-petunjuk Allah itu dengan sengaja diberikan kepada manusia karena pada diri manusia terdapat sifat-sifat dan kecenderungan ganda yakni manusia memiliki sifat baik dan buruk atau shaleh dan dzalim ataupun terpuji dan tercela. Perbuatan shaleh memperoleh pahala atau kenikmatan, dan perbuatan buruk berakibat pada penderitaan. Itulah sebabnya hubungan antara manusia dengan alam lingkungan adakalanya manusia sebagai perusak dan pada saat yang lain manusia

sebagai pemelihara dan pengelola alam (pemakmur bumi). Walaupun mengelola dan membangun kehidupan di bumi tidak mungkin dihindari terjadinya dampak-dampak negatif yang merupakan suatu konsekuensi logis dalam pembangunan. Akan tetapi dengan keistimewaan dan keunggulan yang dimiliki manusia yaitu berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan, diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir berbagai dampak negatif akibat pembangunan tersebut.<sup>25</sup>

Dalam konteks nikmat dari Allah atas segala sesuatu yang diberikan kepada manusia, maka menjaga dan memelihara kelestarian alam adalah merupakan upaya untuk mensyukuri limpahan nikmat dan karunia Allah tersebut. Mencermati tentang tumbuhnya kesadaran manusia untuk memelihara, terdapat tiga hal yaitu : pertama, al-intifa' (mengambil manfaat dan mendaya gunakan dengan sebaik-baiknya).

---

<sup>25</sup>Daud Effendy, "*manusia, lingkungan dan pembangunan prospektus islam*" (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah).h,114.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep pemerintah daerah dalam Pentaan ruang dan wilayah di Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Ketatanegaraan Islam), maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun fungsi pemerintah daerah Bulukumba dalam hal pengawasan penataan ruang, Bupati selaku kepala pemerintahan memiliki peranan sangat penting yaitu mengadakan perencanaan, pembinaan, kerja sama antar Kabupaten lain serta menyebar luaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana perinci Tata Ruang, sedangkan di DPRD mempunyai 3 tugas yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan, Untuk Dinas Penataan Ruang melakukan pengawasan dengan membentuk tim pengawas pembangunan dan di Inspektorat melakukan pengawasan mengenai ke uangan, aspek fisik pekerjaan insfrastruktur dan sumber dayanya.
2. Kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan yaitu, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di daerah Kabupaten Bulukumba sebagai penunjang dalam pengawasan Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bulukumba. kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.
3. Manfaat Penataan Ruang dan Wilayah Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu : manusia memiliki peran penting dalam memelihara dan mengelola alam beserta isinya, manusia tidak dapat berbuat atas kehendaknya sendiri,

melainkan harus bersandar pada yang telah di tentukan karna sudah menjadi kewajiban manusia dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam, serta merupakan upaya untuk mensyukuri limpahan nikmat dan karunia Allah Swt.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Pemerintah bulukumba harusnya lebih mempertegas lagi pengawasan dalam hal penataan ruang untuk meminimalisir terjadinya banjir dan kemacetan sehingga penataan ruang bulukumba bisa tercapai sebagaimana semestinya.
2. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harusnya membangun sarana dan prasarana serta masyarakat harusnya ikut serta membantu pemerintah dalam hal mengawasi jalanya penataan ruang.
3. Masyarakat sadar agar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana yang di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30.

## KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj : Abdullah Hakam Shah, Dkk, Jakarta : Pustaka Al-kauthsar, 2002.
- Effendy, Daud. “*Manusia, Lingkungan dan Pembangunan Prospektus Islam*” (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir* Bandung: Syaamil Quran 2012.
- Koesoemaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Koesmaatmadja, Mochtar. *Konsep- Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung, 2002),
- Hermanislamet, Bondan. *Bahan Kuliah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: PPS UGM, 9 Oktober 1991.
- Hermanto, Bondan. *Aspek Tata Ruang dalam Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan*, yogyakarta: Biro Bina kependudukan dan Linkungan Hidup, Setwilda Provinsi DIY, 1987.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina, 1992
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muthahhari, Murthadlo. *Manusia dan Alam Semesta*, Jakarta, PT Lentera Basritama, 2002
- Nurhadi, *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan*, Tarsito, 2002
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2016.
- Silalahi, Daud. *hukum lingkungan, dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia*, alumni, 2001
- Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Pres, 1984.
- Solihin, *pengaturan hukum rencana tata ruang wilayah dan interior perkotaan*, gramedia pustaka, 2004
- Sugandhy, Aca, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat keterpaduan Pembangunan*, Sulawesi Selatan: Makalah pada Konferensi PSL VII, 1987.



- Sugianto, *teori-teori hukum tata ruang*, rajawali press, 2004
- Sumantri, Hermawan. *Hukum Tata Ruang Perkotaan*, PT. Alumni Bandung, 2004
- Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Sutami, *Ilmu Wilayah: Implementasi dan Penerapannya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Surabaya: Musyawarah KAGAMA III, 6-8 Januari 1977.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*, Cet. I; Makassar; Alauddin Press, 2013.
- Yusuf, Asep Warlan, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1997.
- Wahid, Yunus, *Arti Tata Ruang dalam Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Makalah, PPS UGM, 1991.
- Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2014.
- Wahid, Yunus, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang*, Yogyakarta: Makalah Lingkungan dan Tata Ruang PPS UGM, 1992.

#### **B. Internet**

- <http://Makassar.tribunnews.com>, *dilanda banjir jalan konsolidasi Bulukumba layaknya sungai*, (4 juni 2017).
- <http://www.ibnukatsironline.com>, *Tafsir Surat Al-Araf Ayat 55-56*, (20 Januari 2017).
- <http://www.nuansagiskonsultan.com>, *Peran Penting Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mengendalikan Pembangunan*, (18 Januari 2017).
- [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com), *Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam*, (18 Januari 2017).

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**D. Wawancara**

H. Patudangi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, Wawancara di Gedung DPRD Bulukumba,

Darvin, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, Wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Muh. Yusuf Sommeng, Kepala Inspektorat Bulukumba, Wawancara di Inspektorat Bulukumba.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



### **Riwayat Hidup**

**Muh. Yusril Abni**, lahir di Balang Riri pada tanggal 22 Juli 1995. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari Ambo Rappe dan ibu Sumarti. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tahun 2001 hingga 2007 di SDN 65 Balangriri, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan). Kemudian

penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama pada tahun 2007 hingga 2010 di SMP Negeri 5 Tibona. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas pada tahun 2010 di SMA Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan tamat pada tahun 2013.

Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) dan mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari' ah dan Hukum pada tahun 2013.